Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia

**Muhammad Fazry, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Cik Ditiro, No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
No. Hp. 085225098910, fazrynukujjustice@gmail.com**

PENDAHULUAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan bagaimana implementasi klausula “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi klausula “di kuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktek ketatanegaraan indonesia. Penulisan ini memfokuskan pada bagaimana implementasi penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD 1945. Dan menemukan factor-faktor apakah yang memperngaruhi implementasi penguasaan Negara dalam prakteknya. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Dengan menggunakan model analisis deskriptif kualitatif sebagai pisau analisis. Subjek penelitiannya adalah Pasal 33 UUD 1945 terutama pada klausula “dikuasai oleh Negara”. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pada faktanya Implementasi klausual “*dikuasai oleh Negara*” dalam pasal 33 UUD 1945, sudah melenceng dari nilai-nilai universal Negara Republik Indonesiase, bagaimana dapat terlihat dari Pengaturan atas perekonomian oleh pemerintahan dari Orde ke Orde, yang sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian pancasila. Dengan motode penafsiran hukum dapat dilihat bahwa Menurut sejarahnya, pembangunan ekonomi Indonesia itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan orang seorang. Inkonstitusionalisasi penerapan pasal 33 UUD 1945. telah dimulai dan mencapai puncaknya pada akhir rejim orde baru dan masa reformasi hingga rejim sekarang ini, Inkonstitusionalisasi itu dilakukan dalam bentuk memprivatisasi Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sejatinya menjadi alat bagi negara untuk memajukan kesejahteraan dan tingkat penghidupan rakyat banyak. Serta fakto-faktor yang mempengaruhi implementasi klausula “dikuasai oleh negara” antara lain: faktor internal yang mencakup, (1) Penerapan Hukum yang tidak efektif, (2) Pengaruh Politik dalam pembentukan dan Penegakan Hukum, (3) Degradasi kepemimpinan, serta faktor Eksternal yang mencakup, (1) Sistem Ekonomi Bebas (Liberal), (2) Sistem Kapitalisme Pendidikan, (3) Pengaruh Utang Luar Negeri, (4) Besarnya Intervensi Asing.

Kata Kunci: Implementasi Klausula “*Dikuasai Oleh Negara*” dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam

Praktek Ketatanegraan Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Sebab, hanya dalam kepastian berkeadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiannya secara wajar dan baik. Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan tersebut. Upaya yang semestinya dilakukan guna menciptakan kepastian dan keadilan ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan sehingga ketertiban berkeadilan terwujud.

Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*). Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

Berbicara tentang hukum pada umumnya, masyarakat umumnya hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi. Sedang kita sadar bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas. Oleh karenanya sudah pasti akan terjadi suatu ketimpangan hukum antara apa yang di harapkan dan apa yang terjadi, maka sudah barang tentu rakyat lah yang di korbakan untuk menanggung segala segala carut marutnya suatu negara yang di sebabkan oleh lemahnya suatu peraturan per-undang-undangan dan abstraknya penjelasan dari undang-undang sehingga dapat menimbulkan perbedaan setiap orang dalam menafsirkannya terutama masyarakat awam pada umumnya. adapun kejelekan lain misalnya kepektingan para penguasa dalam menitipkan berbagai nafsu di dalam undang-undang, maka walaupun suatu mekanisme yang sudah jelas dapat berdampak pada pelaksanaannya yang tak kunjung-kunjung jelas. Oleh karenanya untuk mengaktualisasikan suatu hukum yang baik sangatlah bergantung, kepada siapa, dari mana, dan seperti apa. Apakah yang mengendalikan hukum itu ialah sosok individu yang tak berpangkat, ataukah sekelompok orang, pemerintah, terlebih lagi apabila ia adalah seorang pemimpin, sebagai seorang manusia sosok pemimpin sangatlah diutamakan, dalam hal ini apakah ia mampu memikul dipundaknya amanat yang sudah dititipkan oleh masyarakat, apakah ia mampu memberi kepada siapa yang berhak dan pantas untuk diberi, dan sebaliknya tidak memberi kepada mereka yang tidak pantas untuk diberi, inilah kemudian yang dianggap barometer.

Disini penulis akan mengutip penjelasan salah satu surat di dalam Al-Quran, sebagai landasan penjelasan akan pentingnya suatu penerapan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, yang tak terlepas pisahkan dari tangan-tangan para pengendali hukum yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Al-Qur'an telah menuntun kita untuk memberi amanah kepada pemimpin yang menjalankan agamanya dengan baik, menegakkan hukum dan keadilan, berpegang pada kebenaran, lekas bertobat bila keliru, memberi informasi yang benar pada rakyatnya, tidak menurutkan hawa nafsu dan selalu membina hubungan baik kepada Allah dan masyarakat. Pemimpin yang seperti ini akan menyebarkan berkah disekelilingnya. Sebaliknya, kegagalan memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai normatif, bukan saja menebar musibah di kalangan manusia, namun akan membuat buah yang manis menjadi kecut, tanah yang subur menjadi kering, dan keberkahan menjadi hilang.

Penjelasan diatas merupakan hal penting yang dikupas dalam penulisan ini, selain penjelasan tentang interpretasi dan hukum secara substansial. Karna hal ini dianggap esensial dari penerapan prinsip-prinsip keadilan, moralitas dan etikalitas. Sudah seyogianya hukum dalam suatu masyarakat diciptakan sebagai perangkat yang mengatur tata perilaku masyarakat agar sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Pada tataran kenegaraan, hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan warga negara agar tercipta keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan kenegaraan, hukum diciptakan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Sebagai suatu aturan berbentuk teks, peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak bisa terlepas dari keterbatasan, baik dalam menyesuaikan dengan perkembangan masa, maupaun dalam hal pencapaian rasa keadilan masyarakat. Sebagai suatu aturan, peraturan yang mengatur kehidupan

kenegaraan ini dituntut memiliki kepastian hukum sehingga jelas hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh rakyat. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. Sebaliknya apabila suatu peraturan yang di perlakukan secara bebas akan membuka satu gerbang baru atau suatu jalan kapada para penguasa yang tidak bermoral untuk mengodok suatu peraturan tersebut sesuai dengan kepentingan dan egosentris mereka masing-masing. oleh karenanya ketakterpisahan antara ketaatan terhadap peraturan dan kemerdekaan seseorang yang ter arah dalam tatanan peraturan merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa di lepas pisahkan, maka pasti dapat mewujudkan suatu keseimbangan antara antara kepastian hukum dan keadilan hukum.

Pada dasarnya esensi tujuan dari hukum ialah pada umumnya untuk menata kehidupan di muka bumi ini dan pada khusus nya untuk menata sejumlah kehidupan dalam ber-Negara.di dalam suatu Negara pastilah memiliki hukum yang tersendiri yang terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama guna untuk mengatur serta untuk menjalankan seluruh perangkat-perangkat kenegaraan,guna untuk mengarahkan suatu Negara pada bentuk tatanan kehidupan kenegaraan yang jauh dari ketidak-keadilan sebab ber-asas kan keadilan.berbicara tentang hukum yang mengatur tatanan keidupan dalam suatu Negara untuk menjawab rasa keadilan, maka hukum yang mengatur tersebut haruslah berhubungan dengan isinya, setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Secara terminologi klasik dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian

kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan yunani kuno *politea* dan perkataan bahasa latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politea* dan *konstitutio* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme di ekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah dalam sejarah. Dari kedua istilah itu, kata *politea* dari kebudayaan yunani dan dapat di sebut yang paling tua. Dalam bahasa yunani tidak di kenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata *jus* ataupun *konstitutio* sebagaimana dalam tradisi romawi yang datang kemudian. Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof yunani kuno, perkataan *constitution* adalah seperti apa yang kita maksud skarang ini.¹

Perkataan *constitution* di zaman kekaisaran Romawi (*Roman empire*), dalam bentuk bahasa latinya mula-mula di gunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the emperor*. Bersama dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang di pinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, istilah teknis *constitution* juga di pinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu (*ecclesiastical*). Oleh Karena itu, kitab-kitab Hukum Romawi dan Hukum Gereja (kakonik) itulah yang sering di anggap sebagai sumber tujuan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan *konstitution* dalam sejarah. Dengan perkataan lain pengertian konstitusi itu di zaman yunani kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang di mengerti di zaman moderen sekarang. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam perbedaan yang di

¹ E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010. hlm. 12.

lakukan oleh Aristoteles terhadap pengetian kata *politea* dan *nomoi*. Pengertian *politea* dapat di sepadamkan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa.²

Di sisi lain kita akan menemukan suatu peradaban pengetahuan jikalau kita hendak menarik satu titik terang, hal itu dapat di temukan dengan seksama melihat ke dalam terminologi konstitusi yang di pahami dan di wariskan oleh Islam konstitusionalisme dan piagam. pada masa-masa selanjutnya, ketika bangsa eropa berada dalam keadaan kegelapan yang biasa di sebut sebagai abad-abad pertengahan, tidak banyak hal yang dapat di uraikan sebagai inovasi dan perkembangan yang penting dalam hal ini. Namun, bersamaan dengan masa-masa suram di Eropa selama abad-abad prtengahan itu, di timur tengah tumbuh dan berkembang pesat peradaban baru di lingkungan penganut islam. Atas pengaruh Nabi Muhammaad SAW, banyak sekali inovas-inovas baru dalam kehidupan mat manusia yang di kembangkan menjadi pendoronng kemajuan peradaban. Sejarah menunjukan bahwa Nabi Muhammad SAW. dan umat islam, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW. Sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelh pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya yang disebut Yasrid. Kalau dimekah mereka sebelum merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.

Salah satunya adalah penyusunan penandatanganan persetujuan atau perjanjian bersama di antara kelompok-kelompok penduduk di kota madinah untuk sama-sama membangun struktur kehidupan yang di kemudian hari berkembang menjadi kehidupan kenegaraan dalam pengertian moderen sekarang. Naskah persetujuan bersama itulah yang kemudian di kenal dengan sebagai

² *Ibid.*, hlm. 13.

Piagam Madinah (*Madinah Charter*). Piagam Madinah ini dapat di sebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat di bandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti moderen. Piagam ini di buat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah sebelumnya, pada 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinah tersebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan satu sama lain.

Demikian berdasarkan pengulasan sejarah konstitusi dapat kita menarik satu gambaran bawasanya betapa penting dan, muliah marwah serta Ruh di balik terbentuknya suatu konstitusi, Maka sangatlah Ironis ketika terdapat seperangkat aturan yang mengatas namakan konstitusi yang menaungi suatu negara untuk mengatur kepentingan masyarakat, yang pada kenyataanya masih terdapat bentuk praktek-praktek ketidak adilan di dalam nya. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Penegasan ini berarti bahwa sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilih Negara hukum (*welfarestaat*) sebagai bentuk suatu Negara, yang berarti bahwa, setiap tindakan dan akibatnya, yang di lakukan oleh semua pihak di Negari ini, harus di dasarkan atas hukum dan di selesaikan menurut hukum. Indonesia adalah Negara yang berbentuk demikian, yang telah memilih hukum sebagai sarana utama untuk mengatur kehidupannya, Kesejahteraan sosial, ekonomi, menjaga dan menguasai berbagai harta kekayaannya, potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan berbagai aspek kehidupan lainnya, hal itu telah tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan pedoman Negara, untuk mengarahkan arah dan tujuan Negara tersebut.³

³ Inyia Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008. hlm. 88.

Dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, pasal 33 UUD 1945. menekankan bawwasannya pembangunan ekonomi nasional haruslah berlandaskan pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan paramater dari keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya yang merata, bukan semata-mata angka pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan ekonomi fisik. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengutamakan kepentingan masyarakat bersama, tanpa mengabaikan kepentingan individu. Pada Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa : (a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan atas Pasal tersebut mencantumkan istilah dan sekaligus konsep “demokrasi ekonomi” apabila ditafsirkan berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat di katakan bahwa monopoli yang ada dan boleh di lakukan oleh di Republik Indonesia adalah hanya di lakukan oleh negara, Dan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, maka monopoli itu hanya bisa di lakukan dan ditunjukan untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”

Namun kemudian, yang menjadi permasalahan dan perlu suatu penafsiran hukum yang lebih jauh ke dalam serta sebuah aturan hukum yang tegas adalah Bagaimana maksud dan arti secara mekanis terhadap klausul “dikuasai oleh Negara, Hal tersebut di perlukan karena akhir-akhir ini di rasakan adanya perbedaan penafsiran. apakah maksud di kuasai oleh negara adalah di kelola oleh negara”? dalam hal ini adalah pemerintah”? ataukah pihak swasta”? beberapa pakar hukum disinyalir memiliki perbedaan pendapat dan penafsiran yang berlawanan, terus bagaimana penefsiran masyarakat dalam melihat hal ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang penulis akan teliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Klausula “Di Kuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Implementasi Klausula “Di Kuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Klausula “Di Kuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Implementasi Klausula “Di Kuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi Teoritis, diharapkan dapat menjadi bagian dari masukan guna menambah wawasan dalam mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata Negara.
2. Dari segi Praktis, menganalisis sejauh mana perkembangan Penafsiran Hermeneutika Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.

Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan merupakan suatu produk hukum yang sangat responsive dalam keberpihakannya terhadap Rakyat, dan sarat akan wawasan kebangsaan, merupakan suatu produk hukum yang diamanatkan untuk mendobrak watak kolonialis yang masih mencengkeram bangsa Indonesia dalam struktur penindasan dari tahun ke tahun untuk menjadi bangsa dan negara yang benar-banar merdeka, maka tak heran dalam Bab XIV UUD 1945 Pasal 33 (Amandemen ke-4 tahun 2002) yang berjudul “Perekonomian Nasional Dan, Kesejahteraan Sosial” ini bisa terbilang merupakan salah satu pasal yang sangat fundamental, karna merupakan penopang atau gerbang landasan kebangsaan Negara Republik Indonesai.

Maka yang Yang harus disadari bahwa pasal tersebut tak terlepas dari sasaran empuk oleh berbagai kepentingan ekonomi, politik, soial, dan budaya. Fakta pengalaman awal kita Dalam melihat penuangan konsep pasal 33 UUD 1945 pastilah tak terlepas dan terbentuk dari suatu kondisi historis yang melingkupi Negara Republik Indonesai, serta kondisi psikologis tertentu yang dialami para pendiri bangsa kita dalam menuangkan arti dan pengertian dari pasal dan hingga turunanannya. Oleh sebabnya dalam hal ini, penulis akan menggunakan hermeneutika hukum sebagai metode penemuan baru dengan interpretasi teks, yang mampu mengangkat suatu kondisi, dimana kondisi tersebut yang melatarbelakangi lahirnya suatu hukum.

Metode interpretasi tersebut dapat membantu dalam menemukan suatu implementasi secara riil serta tidak mengaburkan setiap isi, definisi, makna, dan kondisi historis yang

terkandung di dalam pasal tersebut. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang sangat luas cakupannya. Ia dapat dilakukan oleh orang-perorangan (individu), ilmuwan/peneliti hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara/advokat), direktur perusahaan swasta BUMN/BUMD sekalipun. Namun dalam hal ini penulis berusaha membatasi diri pada upaya penemuan hukum Oleh hakim, ilmuwan/peneliti hukum tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit, tetapi juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa untuk memperoleh pengertian “*hermeneutika hukum*” kita dapat kembali pada pembahasan hermeneutika yang telah dipahami terlebih dahulu secara umum. Term hermeneutika itu sendiri diambil dari peran Hermes atau Nabi Idris, yang esensinya adalah sebuah ilmu atau seni menginterpretasikan (*The Art Of Interpretation*) ‘teks’. Sedangkan dalam perspektif yang lebih filosofis, hermeneutika adalah aliran filsafat yang mempelajari hakikat mengerti/memahami ‘sesuatu’. Kata ‘teks’ atau sesuatu dalam pengertian yang sedang dibahas ini adalah berupa “teks hukum atau peraturan perundang-undangan”. Dan ia kapasitasnya menjadi “objek” yang ditafsirkan.⁴

Oleh karenanya penulis akan menggunakan metode “*hermeneutika hukum*” sebagai salah satu alternatif metode penemuan hukum baru (selain metode “interpretasi hukum” dan “kontruksi hukum”) untuk melihat lebih jauh ke substansi, dalam mengkaji pembahasan tersebut, sebab hermeneutika hukum bukan halnya metode yang hanya sebatas melihat suatu peraturan hukum atau bunyi hukum semata. namun lebih menaruh perhatian kepada,

⁴ E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah metode filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999. hlm., 21.

bagaimana menemukan dan membentuk nilai hukum baru yang sesuai dengan eksistensi dan kondisi hukum tersebut.⁵

Esensi dan eksistensi dari pengertian hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata “sesuatu/teks” yang dimaksudkan di sini, bisa berupa: teks hukum, peristiwa hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat ahkam dalam kitan suci, ataupun berupa pendapat dan hasil ihtijad para ahli hukum (doktrin). Oleh karena titik tolak dari hermeneutika (Hukum) adalah kehidupan manusiawi dan produk-produk kulturalnya (termasuk teks-teks yuridikal). Metode dan teknik menafsirkannya tidak terlepas dari bunyi hukum dan semangat hukum, yang sistematiskan dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.⁶

1. Teks dan Historis Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945.

Latar belakang lahirnya pasal 33 UUD 1945 mendekatkan kita untuk memahami lahirnya konstitusi. Dalam kenyataannya, perdebatan sebelum dimuatnya pasal 33 dalam konstitusi telah lebih dahulu dilakukan musyawarah oleh para “Founding Father” bangsa Indonesia. Melalui rapat Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, para Founding Father ini mengeluarkan berbagai macam pendapat dan pernyataan yang intinya untuk mencari rumusan yang tepat dalam membuat satu pasal mengenai perekonomian didalam materi muatan konstitusi.

Saat Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-6, Bung Karno bertutur ikhwal Hukum dan Moral yaitu Sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa bisa menjadi besar dan makmur. Terbukti dalam sejarah segala jaman, bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit. Kebesaran bangsa dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

⁶ *Ibid.*

kemakmuran selalu “kristalisasi” keringat. Ini adalah hukum, yang kita temukan dari mempelajari sejarah. Bangsa Indonesia, tariklah moral dan hukum ini.

Adapun Ketua Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 15 April 2004 menyatakan bahwa dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan Negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma kedalam naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis dan histories perumusan yuridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, karena ia tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya.⁷

Dalam pengertian itulah, adalah bijak sekiranya riwayat Pasal-33 UUD45 yang Jati Diri Bangsa dapat ditelusuri bersama sejak ketika para Bapak Bangsa Indonesia menggagas Indonesia Merdeka. Pada tahun 1931, Bung Hatta melahirkan istilah “*Kedaulatan Rakyat*” pada majalah Daulat Ra’jat, kemudian pada tahun 1932, menguraikan tentang Kedaulatan Rakyat pada brosur Kearah Indonesia Merdeka. Kedaulatan Rakyat versi Barat hanya mencakupi pengertian Demokrasi Politik saja sedangkan Kedaulatan Rakyat versi Bung Hatta (*Volkssouvereiniteit*) mencakupi pengertian Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi sekaligus serta bersumber

⁷ Ahmad Sukardja. *Piagam Madianah Dan Undang-Undang Dasar Nkri 1945*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 44.

dari sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri. Bung Hatta juga menegaskan bahwa bagi Indonesia, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang.⁸

Pada tahun 1933, Bung Karno menguatkan bahwa keberadaan Demokrasi Asli Indonesia itu dalam Mencapai Indonesia Merdeka dengan melahirkan istilah Sosio-Demokrasi. Pada tahun 1943, KRT Radjiman Wediodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, telah menyebutkan bahwa Adam Smith adalah cerdik pandai yang tidak menganggap “kepentingan diri sendiri” atau “pamrih diri sendiri” sebagai penyakit masyarakat demokrasi. Teori Ekonomi Barat memang berpedoman pada kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme, dan itulah yang ditolak oleh para Founding Fathers NKRI. Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato R.M.T.A Soerjo, anggota BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) adalah mengemukakan bahwa tujuan Negara Baru yang harus Subur dan Makmur membutuhkan perekonomian yang sehat dan praktis.⁹

Akan tetapi karena perekonomian ini berhubungan erat dengan keadaan rakyat jelata, maka seharusnya kita pandang lebih dahulu keadaan rakyat pada dewasa ini. Dengan sendirinya nampak pada kita kerendahan penghidupan dan kelemahan dalam segala-galanya. Dari antara kelemahan-kelemahan itu yang kami pandang terpenting sendiri, ialah kesehatan. Karena usaha-usaha yang baik-baik akan kandas belaka, apabila orang yang menjalankannya, menderita sakit. Dengan menyesal kita mengakui bahwa kebanyakan dari antara kita Indonesia umumnya dan rakyat jelata khususnya, banyak yang menderita penyakit macam-macam, seperti : malaria, luka-luka, frambusia, trachoom, teering, mijnworn, dan penyakit lain yang lebih jahat, dan yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁹ <http://pitikkedu.blogspot.com/2012/12/pengertian-ekonomi-dan-hukum-ekonomi.html>

sebenarnya melemahkan tenaga lahir dan batin umumnya, hingga kita menjadi bangsa yang lemah ini.¹⁰

Tak usah kita menyalahkan siapapun juga, akan tetapi harus merasa berkewajiban, untuk berusaha secepat mungkin, guna menyembuhkan rakyat kita dari beberapa penyakit tersebut diatas. Kesehatan badan akan menimbulkan kesehatan batin dan keteguhan tekad, hingga kita kuat akan menjalankan perekonomian baru, yang dalam Negara Merdeka amat penting sekali. Adapun guna melaksanakan cita-cita tersebut, haruslah kita melengkapi : tenaga orang, obat-obat dan alat-alat. Tidak ketiganya perlengkapan ini dapat dilaksanakan dengan lekas-lekas dalam masa peperangan yang segmenting ini, akan tetapi tenaga orang seakan-akan dapat kita percepat. Maka seharusnya dengan segera kita mengadakan pendidikan dokter-bantuan (hulp-dokter) sebanyak mungkin, hingga akhirnya saban kali mempunyai seorang dokter-bantuan sebagai anggota Perabot-desa guna mengobati penyakit rakyat tersebut dan untuk memimpin daerahnya dalam hidup yang sehat. Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato Mr Soesanto Tirtoprodjo, anggota BPUPK adalah bahwa soko guru dari Negara Indonesia Merdeka, dengan singkat, Perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan masyarakat, ini berarti membuang pendirian “liberalisme”.

Catatan Notulis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato A. M. Dasaad, anggota BPUPK adalah bahwa Dasar ekonomi harus dapat perhatian. Saya akan memajukan rancangan bekerja di lapangan politik ekonomi. Catatan notulis pada tanggal 30 Mei 1945 tentang pidato R. Abdoelrahim Pratolykrama, anggota BPUPK ikhwal Perekonomian Ekonomi dalam arti seluas-luasnya perlu diperluas dan diperdalam dan disegala lapangan misalnya nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan. Aturan-aturan hak tanah-tanah kommunal dihapuskan, tanah erfpacht,... Dan postal harus dikembalikan pada rakyat via pemerintah. Catatan notulis pada

¹⁰ *Ibid.*

tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato R. Abdul Kadir, anggota BPUPK ikhwal Dasar-dasar pembentukan Negara baru, Pemba-ngunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof MR DR Soepomo, anggota BPUPK berpidato tentang perhubungan antara Negara dan perekonomian. Dalam Negara yang berdasar integralistik yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme Negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hokum prive atau kepada seseorang itu semua tergantung daripada kepentingan Negara, kepentingan rakyat seluruhnya.¹¹

Dalam Negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalulintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh Negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk Negara akan diurus oleh Negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan Negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani. Dalam lapangan ekonomi, Negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya.

Sistim tolong menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia. Dasar totaliter dari Negara kebangsaan yang bersatu itu mempunyai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepanjangan, jikalau saya

¹¹ <http://renytriuami.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber-hukum.html>

membicarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu. Maka Negara hanya bisa adil, jikalau Negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut aliran jaman. Catatan notulis pada tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato MR R. Hindromartono, anggota BPUPK, bahwa Dasar-dasar pokok masyarakat baru di Indonesia:¹²

1. Stelsel peri penghidupan dan stelsel tatanegara yang tidak saja memperkokoh sumber penghidupan penduduk dan keperluan Negara hingga tidak bergantung pada luar negeri, tetapi pula menjamin keadilan dalam pembagian benda-kekayaan masyarakat (*billijke verdeling van het maatschappelijke inkomen*) kemudian menjamin keberesan jalannya keadilan penghidupan lahir batin rakyatnya.
2. Tentara Rakyat yang kuat, yang sanggup pula mengadakan pertalian cinta mencintai dengan lapisan rakyat murba diluar dunia ketentaraan. Keadaan desa Indonesia yang belum mengenal adanya hak milik atas tanah dari penduduknya, inilah yang harus menjadi “dasar-rupa” (*grondkleur*) buat Negara Indonesia. Semua kekayaan alam dan kekayaan masyarakat yang penting bagi penghidupan semua atau sebagian besar penduduk desa adalah masyarakat desa yang memilikinya. Perbedaan tingkatan yang menyolok mata antara masing-masing penduduk, perbedaan kaya dan miskin yang mengerikan dalam masyarakat itu asing sama sekali. Walaupun begitu, disiplin tidak kurang teguhnya, kerukunan tidak kurang kokohnya. Narakarya (kaum romusha, pegawai rendahan dan sesamanya), Naradesa (penduduk yang menyediakan hasil bumi) disamping prajurit digaris depan, memberikan kurban dan tenaga guna mencapai kemenangan. Jadi harus dihargai dengan didalam asas hokum dasar Negara diadakan pengakuan dan peraturan bahwa kedudukan dan penghargaan atas golongan dua itu akan dapat perhatian sesuai dengan kepentingannya bagi masyarakat. Tentara rakyat (termasuk golongan polisi) harus dibentuk oleh rakyat dan mengabdikan pada kepentingan

¹² *Ibid.*

rakyat. Dasar-dasar pokok ini tidak saja buat keselamatan masyarakat didalam negeri tetapi boleh dibanggakan pada medan dunia internasional.

Saat berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno, anggota BPUPK, menyatakan bahwa Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni “*politiek economische democratie*” yang mampu mendatangkan kesejahteraan social, Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil. Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah “*sociale rechtvaardigheid*,” rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (*rechtvaardigheid* = keadilan sosial). Panitia Kecil Soepomo bekerja dari tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945, yang hasilnya kemudian dibahas di Panitia Perancang UUD, Tentang Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar (Rapat Besar Tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar) Pasal-32 sebagai berikut :¹³

1. Perekonomian disusun sebagai uasaha bersama berdasar atas kekeluargaan;

¹³ Yustika, Ahmad Erani. *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo, 2002. hlm. 71.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Konteks Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945.

a. Konteks masa lampau (Historis)

Pada hakikatnya telah terdapat banyak pemikiran manusia, tentang perekonomian dan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, Adam Smith, John Maynard Keynes, Aristoteles, dan John Lock misalnya. Sistem ekonomi dan hukum yang ada saat ini kebanyakan berasal dari pecahan-pecahan teori ekonomi dan hukum dunia barat. Yang berlandaskan pada kaidah material dan menyamping dari kaidah spiritual, hal ini menarik untuk kita lihat apakah dasar pemikiran tersebut, ikut mewarnai mewarnai isi kepala para pendiri bangsa kita. Oleh karenanya kita akan memulai membahas para tokoh yang dianggap memiliki peran serta sumbangsi yang besar atas terbentuknya jati diri, dan ideologi suatu bangsa ini. Pemikiran dan pencapaian merupakan satu kesatuan yang akan menentukan hasil dari tindakan, hal itu tak terlepas dari pengaruh bagaimana suatu lingkungan membentuk kepribadian subjek pemikir.¹⁴

Soekarno dan Moh. Hatta misalnya, keduanya merupakan Dwi tunggal yang jasanya tidak bisa dilupakan begitu saja dalam membangun negeri ini. Peranan besar yang telah dilakukan oleh kedua orang ini, terutama dalam hal memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan akan selalu terpatri sebagai jasa-jasa yang tidak akan tergerus selamanya oleh masa. Memang, jika kita amati. Sosok kedua Bapak bangsa ini merupakan pribadi yang unik satu sama lainnya. Pribadi yang saling melengkapi dan mengisi kekurangan-kekurangan

¹⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasional, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. hlm. 10.

yang ada diantara mereka. Sebagai sosok yang memiliki label penggerak massa, Soekarno memiliki peranan sebagai pemain depan yang dengan jelas terlihat bagaimana pola pikir dan cara berbicaranya ketika berada di depan podium untuk berpidato. Soekarno adalah Singa Podium yang berjuduk “penyambung solidaritas rakyat”. Ia memainkan peran dalam menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan untuk tercapainya Indonesia merdeka.¹⁵

Berbeda dengan sosok Soekarno. Moh. Hatta adalah sosok yang lebih bersifat ‘dibelakang layar’. Visi dan misinya yang berbentuk konsep mampu memberikan jalan yang lebih luas bagi Soekarno untuk menciptakan jalan dalam menghadapi kendala dan rintangan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Moh. Hatta juga memiliki kecenderungan sebagai seorang administrator yang mampu memposisikan diri sebagai konseptor handal dalam menyusun beragam strategi untuk mencapai usaha tersebut. Namun, terlepas dari semua hal tersebut. Merupakan hal yang unik dalam benak penulis ketika dihadapkan dalam sebuah penelitian historis untuk melihat dalam perspektif perbedaan pemikiran tokoh-tokoh yang nantinya di bahas. Sangat membantu jika terdapat Perbedaan-perbedaan mendasar antara para tokoh dalam melihat dan mengamati persoalan-persoalan yang berkaitan tentang Nasionalisme, Demokrasi, Islam, Ekonomi, dan hukum. Karena Akan senantiasa mampu menjadi ‘batu asahan’ sekaligus ‘mata pisau’ bagi kita semua untuk lebih obyektif lagi melihat pemikiran dan sumbangsih para *founding father* ini dalam dinamika perkembangan masalah sosial-politik, dan hukum di Indonesia. Dan sudah barang tentu beragam pemikiran tersebut ikut mewarnai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia, (UUD NRI).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

1. Rekonsepsi Soekarno¹⁶

a. Biografi Soekarno

Ir. Soekarno (Lahir Di Blitar Pada 6 Juni 1901- Meninggal Pada Tanggal 21 Juni 1970 Di Kota Blitar, Jawa Timur). Ayahnya Raden Sukemi Sosrohadihardjo, Adalah Seorang Priyayi Rendahan Yang Bekerja Sebagai Guru Sekolah Dasar. Ibunya Nyoman Rai Berdarah Biru Dari Bali Dan Beragama Hindu. Pertemuan Mereka Terjadi Ketika Raden Sukemi, Yang Sehabis Menyelesaikan Studi Di Sekolah Pendidikan Guru Pertama Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Ditempatkan Di Sekolah Dasar Pribumi Di Singaraja, Bali.

Selanjutnya Bandung dimana kita dapat menemukan sosok Soekarno dewasa yang mulai mewarnai pemikirannya, Di Kota Ini, Soekarno Berkenalan Dengan Tokoh-Tokoh Nasionalis Sekuler, Seperti, E.F.E Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo Dan Ki Hajar Dewantara. Perkenalan Ini Telah Membawa Nuansa Baru Dalam Berpikir Soekarno. Seperti Halnya Dalam Pendekatan Yang Diperkenalkan Oleh Douwes Dekker Dalam Mendekati Situasi Hindia Belanda Dan Bagaimana Cara Mengubahnya Amat Menarik Perhatian Soekarno. Pemikiran Yang Diperkenalkan Tersebut Terlihat Berbeda Dari Pemikiran Sebelumnya Didapat Dari Tokoh-Tokoh Yang Ditemuinya.

Dengan Bertemunya Berbagai Tokoh Yang Memiliki Berbagai Aliran Pemikiran Tentunya Membuat Pikiran Soekarno Semakin Tersusun Secara Teratur. Di Samping Itu Kesaksiaannya Terlihat Di Depan Matanya. Soekarno Melihat Di Lingkungan Tjokrominoto Senantiasa Timbul Pertentangan Antara Golongan Kanan (Tjokrominoto) Dengan Golongan Kiri (Semaun-Darsono) Dalam Sentral Serikat Islam Yang Berkedudukan Di Surabaya. Pertikaian

¹⁶ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2249663-founding-fathers-html>.

Yang Memuncak Tersebut Berakhir Dengan Terpecahnya Sarekat Islam Menjadi Dua Bagian, Yakni Sarekat Islam Putih Dan Merah. Sarekat Islam Merah, Akhirnya Merubah Dirinya Menjadi Sarekat Rakyat.

Pada Tahun 1926, Soekarno Mendirikan Algemene Studie Club Di Bandung. Organisasi Ini Merupakan Cikal Bakal Dari Partai Nasional Indonesia (PNI) Yang Didirikan Olehnya Pada Tahun 1927. Aktivitas Soekarno Di PNI Menyebabkan Dirinya Ditangkap Oleh Belanda Pada Bulan Desember 1929, Dan Memunculkan Pledoi Atau Pembelaannya Yang Fenomenal Dengan Judul Indonesia Menggugat, Hingga Dibebaskan Kembali Pada Tanggal 31 Desember 1931. Pada Bulan Juli 1932, Soekarno Bergabung Dengan Partai Indonesia (Partindo), Yang Merupakan Pecahan Dari PNI. Akibatnya, Soekarno Kembali Ditangkap Pada Bulan Agustus 1933, Dan Diasingkan Ke Flores. Disini, Soekarno Hampir Hilang Dan Terlupakan Oleh Tokoh-Tokoh Nasional. Namun, Semangat Dan Api Perjuangan Yang Tidak Pernah Padam Senantiasa Membuat Soekarno Tetap Tegar Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Perjuangan. Ini Terbukti Melalui Suratnya Kepada Seorang Guru Persatuan Islam Bernama Ahmad Hassan.

Selama Menjadi Presiden, Soekarno Banyak Memberikan Gagasan-Gagasan Di Dunia Internasional. Keprihatinannya Terhadap Nasib Bangsa Asia-Afrika, Masih Belum Merdeka, Belum Mempunyai Hak Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri, Menyebabkan Presiden Soekarno, Pada Tahun 1955, Mengambil Inisiatif Untuk Mengadakan Konferensi Asia-Afrika Di Bandung Dan Menghasilkan Dasa Sila Bandung. Tujuan Dari KAA Adalah Untuk Menentang Tindakan Imperialisme Dan Kolonialisme Yang Terjadi Di Dunia Yang Notabenenya Banyak Dilakukan Oleh Negara-Negara Barat.

b. Pemikiran Soekarno

▪ Antikolonialisme dan Anti-Imperialisme

Salah Satu Tulisan Pokok Yang Biasanya Diacu Untuk Menunjukkan Sikap Dan Pemikiran Soekarno Dalam Menentang Kolonialisme Adalah Tulisannya Yang Terkenal Yang Berjudul Nasionalisme, Islam Dan Marxisme”. Dalam Tulisan Yang Aslinya Dimuat Secara Berseri Di Jurnal Indonesia Muda Tahun 1926 Itu, Sikap Antikolonialisme Tersebut Tampak Jelas Sekali. Menurut Soekarno, Yang Pertama-Tama Perlu Disadari Adalah Bahwa Alasan Utama Kenapa Para Kolonialis Eropa Datang Ke Asia Bukanlah Untuk Menjalankan Suatu Kewajiban Luhur Tertentu. Mereka Datang Terutama “Untuk Mengisi Perutnya Yang Keroncong Belaka.” Artinya, Motivasi Pokok Dari Kolonialisme Itu Adalah Ekonomi.

Sebagai Sistem Yang Motivasi Utamanya Adalah Ekonomi, Soekarno Percaya, Kolonialisme Erat Terkait Dengan Kapitalisme, Yakni Suatu Sistem Ekonomi Yang Dikelola Oleh Sekelompok Kecil Pemilik Modal Yang Tujuan Pokoknya Adalah Memaksimalisasi Keuntungan. Dalam Upaya Memaksimalisasi Keuntungan Itu, Kaum Kapitalis Tak Segan-Segan Untuk Mengeksploitasi Orang Lain. Melalui Kolonialisme Para Kapitalis Eropa Memeras Tenaga Dan Kekayaan Alam Rakyat Negeri-Negeri Terjajah Demi Keuntungan Mereka. Melalui Kolonialisme Inilah Di Asia Dan Afrika, Termasuk Indonesia, Kapitalisme Mendorong Terjadinya Apa Yang Ia Sebut Sebagai *Exploitation De L’homme Par L’homme* Atau Eksploitasi Manusia Oleh Manusia Lain. Soekarno Menentang Kolonialisme Dan Kapitalisme Itu. Keduanya Melahirkan Struktur Masyarakat Yang Eksploitatif. Sebagai Suatu Sistem Yang Eksploitatif, Kapitalisme Itu Mendorong Imperialisme, Baik Imperialisme Politik maupun Imperialisme Ekonomi. Tetapi Soekarno Muda Tak Ingin Menyamakan Begitu Saja Imperialisme Dengan Pemerintah Kolonial. Imperialisme.

- Anti-Elitisme

Selain Kolonialisme Dan Imperialisme, Di Mata Soekarno Ada Tantangan Besar Lain Yang Tak kalah Pentingnya Untuk Dilawan, Yakni Elitisme. Elitisme Mendorong Sekelompok Orang Merasa Diri Memiliki Status Sosial-Politik Yang Lebih Tinggi Daripada Orang-Orang Lain, Terutama Rakyat Kebanyakan. Elitisme Ini Tak kalah Bahayanya, Menurut Soekarno, Karena Melalui Sistem Feodal Yang Ada Ia Bisa Dipraktikkan Oleh Tokoh-Tokoh Pribumi Terhadap Rakyat Negeri Sendiri. Kalau Dibiarkan, Sikap Ini Tidak Hanya Bisa Memecah-Belah Masyarakat Terjajah, Tetapi Juga Memungkinkan Lestarnya Sistem Kolonial Maupun Sikap-Sikap Imperialis Yang Sedang Mau Dilawan Itu. Lebih Dari Itu, Elitisme Bisa Menjadi Penghambat Sikap-Sikap Demokratis Dalam Masyarakat Modern Yang Dicita-Citakan Bagi Indonesia Merdeka.

Ir. Soekarno adalah seorang tokoh besar, pemimpin bangsa dan bahkan juga dikenal sebagai pemimpin revolusi bangsa Indonesia. Beliau berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kontribusi beliau lainnya adalah dalam penyusunan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI I tanggal 1 juni 1945 beliau menyampaikan usulan dasar negara yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia, Dengan melihat kondisi Indonesia yang berkepulauan dan berbangsa-bangsa, maka di munculkan dalam dasar negara tentang kebangsaan Indonesia ini. Beliau bermaksud dengan berbagai bangsa-bangsa tersebut kita dapat menjadi satu dalam kebangsaan Indonesia. Soekarno sudah memikirkan Indonesia jauh kedepan dengan dasar ini agar kita tidak mudah terpecah belah dengan berbagai perbedaan yang ada.
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, Internasionalisme dimunculkan soekarno karena beliau memang seorang yang telah banyak memiliki relasi luar negeri. Sosok yang senang bersosialisasi dengan negara lain tetapi tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar negeri. Dengan dasar ini, soekarno berharap Indonesia kelak dapat menjalin hubungan

baik dengan bangsa lain tanpa mengikuti ideologi mereka. Perikemanusiaan diambil karena rakyat Indonesia diharapkan saling menghargai manusia yang lain.

3. Mufakat atau demokrasi, Soekarno memunculkan dasar ini karena melihat kebiasaan rakyat Indonesia yang sejak dari dulu telah menerapkan musyawarah dalam memecahkan masalah. Beliau berfikir musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut adalah cara yang paling cocok terhadap kepribadian bangsa Indonesia. Dengan musyawarah semua orang dapat menyampaikan pendapatnya, kemudian semua usulan ditampung untuk dicari penyelesaian yang terbaik. Sehingga tercipta demokrasi dalam masyarakat itulah tujuan beliau dalam dasar ini.
4. Kesejahteraan sosial, Dasar ini dimunculkan Soekarno merupakan hasil dari ketiga dasar sebelumnya. Maksudnya adalah jika dasar sebelumnya yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, dan mufakat atau demokrasi dapat berjalan dengan baik maka secara otomatis akan tercapai kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.
5. Ketuhanan yang berkebudayaan, Dasar terakhir yang dicetuskan Soekarno dalam usulannya ini mengapa tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Karena dalam berpedoman dengan 4 dasar sebelumnya harus terdampingi oleh agama. Karena kemerdekaan sendiripun tidak dapat datang sendiri, semua itu juga atas rahmat Tuhan. Berkebudayaan mengikuti di belakang ketuhanan karena pada masa setelah kemerdekaan terdapat berbagai kebudayaan, dan mereka mempunyai kepercayaan masing-masing. Maka disatukanlah dasar yang terakhir ini ketuhanan yang berkebudayaan diharapkan kita sebagai rakyat Indonesia menganut agama masing-masing dan turut menjaga kebudayaan kita.

Ke lima asas tersebut kemudian diberi nama Pancasila, kemudian diperas menjadi tiga sila yang disebut Tri Sila, yaitu:

- a. Socio-Nationalisme, Perasan Sila I&II
- b. Socio-Democratis, Perasan Sila III&IV
- c. Ketuhanan

Ketiga sila itu lalu diperas lagi menjadi satu sila dan disebut Ekasila yaitu gotong royong.

2. Rekonsepsi Prof. Mr. Dr. Soepomo¹⁷

a. *Biografi Prof. Mr. Dr. Soepomo*

Soepomon berasal dari keluarga aristokrat Jawa, Soepomo dilahirkan di Sukoharjo, 22 Januari 1903. Kedua kakek Soepomo dari pihak ayah dan ibu- adalah bupati pada jaman pemerintahan kolonial. Sebagai keluarga terpandang, Soepomo mendapatkan pendidikan untuk orang-orang Eropa sejak tingkat dasar. Ia mengenyam pendidikan di ELS (*Europeesche Lagere School*) di Boyolali pada tahun 1917, kemudian MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) di Solo pada tahun 1920, dan menyelesaikan pendidikan tingginya di *Bataviasche Rechtshoogeschool* di Batavia pada tahun 1923.

Pada tahun 1924 Soepomo melanjutkan pendidikan ke Universitas Leiden di Belanda. Dibimbing salah satu profesor hukum adat Indonesia dari Belanda, Van Vollenhoven, Soepomo beroleh gelar doktor pada tahun 1927 dengan disertasi berjudul “*De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta*” Menggondol gelar doktor pada usia 24 tahun menjadikan Soepomo sebagai pemegang rekor doktor termuda di Indonesia. Soepomo kurang aktif dalam dunia pergerakan. Ini bisa ditelusuri dari buku Abdul Rivai, yang merupakan catatannya terhadap aktivitas mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Eropa, terutama Belanda, semasa pergerakan nasional. Dalam bukunya tersebut Abdul Rivai hanya satu kali menyebut nama Soepomo, yang ditulisnya sebagai mahasiswa yang sedang mengambil studi *Meest*. Prof. Dr. Mr. Soepomo, merupakan salah satu “*icon*” penting dalam khasanah politik-hukum di Indonesia. Dia merupakan salah seorang penggagas penting dalam pembentukan UUD 1945, sekalipun fokus studinya lebih banyak diarahkan pada soal-soal hukum adat. Terlepas dari kontroversi mengenai gagasannya yang kemudian termuat dalam UUD 1945 yang dikategorikan integralistik, feodal dan kadangkala disebut fasistik, Soepomo tetap saja ditempatkan pada posisi

¹⁷ *Ibid.*

terhormat dalam diskursus politik-hukum di Indonesia. Dalam banyak studi, praktek politik kenegaraan rezim Orde Baru dinilai merupakan penterjemahan paling “mendekati” gagasan yang ditawarkan Soepomo.

b. Pemikiran Soepomo Tentang Negara Integralistik

Negara ini lahir tidaklah semudah membalikkan tangan. Negara ini lahir dengan adanya rasa kecintaan tanah air yang tumbuh dari para Founding Father. Sehingga pada saat pembentukan dasar Negara maka Soepomo berkesempatan untuk menyampaikan pemikirannya dalam memberikan rumusan dasar Negara yang sekarang ini disebut dengan pancasila. Pemikiran soepomo ini pun membawa beberapa nilai yang kemudian disebut dengan tiga teori yang lahir dari pemikiran Negara integralistik ini terdiri atas :

1. Teori individualistic yang menekankan bahwa Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak anatar seluruh individu dalam masyarakat demi menjamin hak-hak individu di dalam masyarakat.
2. Teori pertentangan kelas atau teori golongan sebagaimana diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin. Dalam teori ini, negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah.
3. Teori integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu. Bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral.

Pada saat itu terdapat lima hal yang dibawa oleh soepomo untuk menciptakan suatu dasar Negara yang disebutnya dengan Negara Integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan. Sehingga melahirkan lima pokok pikiran terdiri atas berikut:

- a. Paham Negara Persatuan yang mana Negara Indonesia merupakan Negara dengan banyak golongan maka diharapkan dengan totalitas dan intergralitas mampu menyatukan semua golongan yang ada;
- b. Warga Negara hendaknya tunduk kepada Tuhan supaya ingat kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan setiap golongannya;

- c. Sistem Badan Permusyawaratan;
- d. Ekonomi Negara bersifat Kekeluargaan;
- e. Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya.

Sebelumnya Soepomo menjabarkan adanya tiga permasalahan yang harus diselesaikan sebelumnya. Yang mana harus adanya pemilihan akan persatuan negara, negara serikat, persekutuan Negara. Berkaitan dengan hubungan antara Negara dan agama serta pemilihan bentuk Negara yang tepat untuk Indonesia republic atau kerajaan. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan diatas maka kembali pada pandangan negaa integralistik yang mana adanya persamaan antara para golongan tanpa pembedaan suku, ras dan agama. Hal ini yang mampu di tonjolkan dalam pemikiran Soepomo yaitu ada hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi. Ini lah yang menjadi keunggulan dari konsep Negara integralistik. Namun di balik segala kelebihan yang dimiliki oleh konsep Negara integralistik ini ada kekurangan yang mengikutinya karena ternyata pemikiran atas konsep Negara integralistik ini mengacu pada suatu Negara yang berideologikan fasisme. Sehingga menimbulkan ada pendapat bahwa apa yang dibawa oleh Soepomo akan konsepsi Negara integralistik sesuai dengan nilai-nilai dasar serta masyarakat Indonesia.

Dalam sidang BPUPKI I Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tanggal 31 mei 1945 mengusulkan Dasar Negara yaitu :

1. Persatuan.

Maksud pernyataan tersebut adalah negara Indonesia menjadi negara kesatuan yang bersifat integralistis. Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan akan menjadi negara yang satu yaitu bangsa Indonesia. Bersifat Integralistik adalah pemikiran bersatunya seluruh rakyat dari golongan manapun. Dengan integralistik kita dapat menghargai golongan yang lain. Mungkin soepomo bermaksud dengan pemikiran ini akan tercipta persatuan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan golongan.

2. Kekeluargaan.

Dimaksudkan dalam berkewarganegaraan Indonesia berasaskan kekeluargaan. Contohnya menyelesaikan masalah pertama dengan kekeluargaan terlebih dahulu, jika tidak menemukan titik temu maka ke jalur yang lain. Kemudian contoh selanjutnya adalah didirikannya ssskoperasi. Mengapa koperasi. Karena koperasi adalah organisasi yang berasaskan kekeluargaan, di dalamnya memuat sistem saling menguntungkan. Inilah sebenarnya yang dituju, antar masyarakat diharapkan dengan asas ini bisa saling tolong menolong yang salah satunya dicontohkan dengan dibentuknya koperasi yang termasuk dalam bidang ekonomi.

3. Keseimbangan Lahir Dan Batin.

Dasar yang diusulkan Soepomo ini bermaksud dalam suatu negara nantinya terjadi keseimbangan antara batiniah dan lahiriah. Batin disini berarti berkaitan dengan suatu keyakinan atau agama. Diharapkan setiap rakyat Indonesia nantinya memiliki agama agar dalam berkehidupan lebih terarah. Selanjutnya adalah lahiriah ini berkaitan dengan dunia atau sesuatu yang tampak, maka bangsa Indonesia juga harus membuat suatu kelembagaan untuk mengatur negara ini yang sekarang kita kenal DPR, MPR, Presiden dan para jajarannya. Nah kedua aspek ini harus seimbang agar dalam mengelola negara yang dilandasi dengan ketuhanan, maka perbuatan-perbuatan dosapun akan terhindar. Contohnya untuk sekarang ini seperti korupsi tidak akan muncul jika kedua aspek ini seimbang.

4. Musyawarah

Dasar ini diambil Soepomo dari kebiasaan dan yang telah terjadi pada bangsa Indonesia sejak lama. Musyawarah telah dilakukan oleh para warga desa pada masa dahulu. Maka dasar ini sangat pas untuk bangsa Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Terbukti dalam penyusunan proklamasipun yang dalam keadaan terdesak dilakukan musyawarah oleh para tokoh, disana semua pendapat ditampung dan akhirnya dihasilkan yang terbaik. Diharapkan bangsa Indonesia nantinya menerapkan dasar ini dalam menyelesaikan masalah.

5. Keadilan Rakyat

Dasar yang terakhir dari usulan Soepomo ini dapat tercapai jika keempat dasar sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Keadilan rakyat adalah suatu terciptanya keadilan dalam aspek apapun yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

3. Rekonsepsi Muhammad Yamin.¹⁸

a. *Biografi Muhammad Yamin*

Mohammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawahlunto dan Padang Panjang Ayahnya memiliki enam belas anak dari lima istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain : Muhammad Yamin, seorang pendidik, Djamaluddin Adinegoro seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu sepupunya, Mohammad Amir, juga merupakan tokoh pergerakan Kemerdekaan Indonesia.

Muhammad Yamin menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmadjo. Salah seorang anaknya yang dikenal, yaitu Rahadijan Yamin. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Di zaman penjajahan, Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra Barat, dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis.¹⁹

Pendidikan yang sempat diterima Yamin, antara lain, Hollands inlands School (HIS) di Palembang, tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Algemene Middelbare School (AMS) ‘Sekolah Menengah Umum’ di Yogya, dan HIS di Jakarta. Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalannya selama lima tahun. Studi di AMS Yogya sebetulnya merupakan

¹⁸ B. Arief Sidharta. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 37.

¹⁹ *Ibid.*

persiapan Yamin untuk mempelajari kesusastraan Timur di Leiden. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Kawi, dan sejarah purbakala. Dalam waktu tiga tahun saja ia berhasil menguasai keempat mata pelajaran tersebut, suatu prestasi yang jarang dicapai oleh otak manusia biasa. Pada tahun 1938-1942 Yamin tercatat sebagai anggota Pertindo, merangkap sebagai anggota Volksraad 'Dewan Perwakilan Rakyat'. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin dalam pemerintahan, antara lain, adalah Menteri Kehakiman (1951), Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan (1953-1955), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), dan Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961-1962).

b. Pemikiran Moh. Yamin

Pidato Muhammad Yamin pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik menyatakan lima asas dasar Negara yang hampir sama dengan yang disampaikan Soekarno yaitu:

1. Perikebangsaan.

Maksud Moh. Yamin pada dasar pertama ini adalah negara Indonesia yang beragam dan berpulau-pulau ini menjadi satu yaitu Bangsa Indonesia. Jadi kita menjadikan perbedaan itu sebagai alat persatuan. Dalam perikebangsaan ini diharapkan kita rakyat Indonesia mempunyai rasa nasionalisme kepada bangsa kita ini meskipun kita berada di pulau yang berbeda, suku, ras, golongan yang berbeda pula tapi dengan dasar perikebangsaan ini kita adalah satu bangsa Indonesia.

2. Perikemanusiaan.

Perikemanusiaan berarti menghargai sesama manusia. Dalam hal ini diharapkan bangsa Indonesia dengan dasar ini menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Periketuhanan.

Bangsa Indonesia dapat merdeka tidak hanya kebetulan tetapi karena berkat ijin Allah. Dari pertimbangan tersebut dimunculkan periketuhanan. Diharapkan dengan dasar ini kita sebagai sebuah bangsa yang religius dan mempunyai agama.

4. Perikerakyatan.

Maksud dari perikerakyatan ini adalah bangsa indonesia yang mengayomi seluruh rakyat, menghargai pendapat-pendapat masyarakatnya. Dan hubungan rakyat dengan perangkat negarapun harus baik. Diharapkan dengan dasar ini perangkat negara dapat menampung aspirasi masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia.

5. Kesejahteraan rakyat.

Dasar terakhir ini dapat tercapai jika keempat dasar sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Jika Indonesia telah bersatu dengan segala perbedaan yang ada, saling menghargai HAM, selalu berpegang kepada agama masing-masing, dan berkerakyatan dengan baik maka kesejahteraan rakyat itu hasilnya.

b. Kondisi Negara Republik Indonesia

Periode 1945-1949, yaitu periode perang kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, pada periode ini menampilkan kejelasan implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara lebih terlihat, dengan keikutsertaan warga negara dalam perang kemerdekaan baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Periode 1950- 1965, pada periode ini bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk gangguan keamanan dalam negara, periode ini juga diwarnai dengan perjuangan Trikora merebut kembali Irian Barat dan Dwikora. Secara psikologis kondisi kejiwaan masyarakat indonesia masih dalam bayang-bayang penjajahan, negara dalam berada dala tekanan pihak asing, yang dengan hasrat menguasai dan ingin menjajah kembali, hal ini dapat dilihat dari di keluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959, yang menandakan situasi dan kondisi historis negara republik indonesia yang harus segera di selamatkan.²⁰

²⁰ George Ritzer, *Teori Sosilogi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoderen*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012. hlm. 101.

Badan konstituante yang dibentuk melalui PEMILU 1955, dipersiapkan untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Sejak tahun 1956 Konstituante telah mulai bersidang untuk merumuskan UUD yang baru. Tetapi, sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru. Keadaan seperti ini semakin menggoncangkan situasi politik Indonesia pada saat itu. Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Sementara itu, sejak akhir tahun 1956 keadaan kondisi dan situasi politik Indonesia semakin memburuk dan kacau. Keadaan semakin memburuk karena daerah-daerah semakin memperlihatkan gejolak dan gejala separatisme seperti pembentukan Dewan Banteng, dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni dan Dewan Lambung Mangkurat. Daerah-daerah tersebut tidak lagi mengakui pemerintahan pusat dan bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri, seperti PRRI dan PERMESTA.²¹

Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat mengancam keutuhan Negara dan bangsa Indonesia dari dalam negeri. Suasana semakin bertambah panas, ketegangan-ketegangan diikuti oleh keganjilan sikap dari setiap partai politik dalam konstituante. Rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang. Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi. Pada tanggal 22 April 1959, didepan sidang konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan kembali kepada UUD 1945 sebagai UUD Negara RI. Menanggapi pernyataan Presiden Soekarno tanggal 30 Mei 1959 konstituante mengadakan siding pemungutan suara. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas anggota konstituante menginginkan kembali berlakunya UUD 1945 sebagai UUD Negara RI. Namun, jumlah suara tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari anggota konstituante seperti yang

²¹ *Ibid.*

diisyaratkan pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang kembali tanggal 1 dan 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan dan tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat).²²

Untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik, maka pengumuman istirahat konstituante diikuti dengan larangan melakukan segala bentuk kegiatan terhadap partai politik. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante serta memberlakukan UUD 1945. pemberlakuan kembali UUD 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan positif dari seluruh lapisan masyarakat yang sudah jenuh melihat ketidakpastian nasional yang mengakibatkan tertundannya upaya pembangunan nasional. Dukungan spontan tersebut menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik dan ekonomi. Semenjak pemerintah Republik Indonesia menetapkan dekrit presiden 5 Juli 1959, indonesia memasuki babak sejarah baru, yakni berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi terpimpin.²³

c. Konteks Masa Kini

Dari pengulasan panjang di atas dilihat bahwa konstitusi kita suda mengalami empat kali amandemen, suatu proses pemantapan yang di sesuaikan dengan kerasnya zaman. Sehingga melahirkan suatu produk hukum yang progresif, terutama Pasal 33 UUD 1945, dapat dilihat

²² *Ibid.* hlm. 102.

²³ *Ibid.* hlm. 103.

dengan penambahan dua ayat, ayat 4, dan ayat 5, sehingga menjadikan pasal tersebut semakin kokoh pendiriannya, sebagai jati diri perekonomian Indonesia. Dalam konteks kekinian Pasal 33 UUD 1945, dalam ketegasan yuridisnya masih sangatlah efisien dan konsistensi apabila kita melihat dari segi, bunyi hukum, dan semangat hukum Pasal 33 UUD 1945. Maka pada hakikatnya, pasal tersebut tidak punya andil apapun dari keterpurukan ekonomi saat ini, suatu keterpurukan terberat dalam sejarah Republik ini. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jebakan utang (*debt-trap*) yang seganas ini. Pasal 33 UUD 1945 tidak salah apa-apa, tidak ikut memperlemah posisi ekonomi Indonesia sehingga kita terhempas oleh krisis moneter.²⁴

Pasal 33 UUD 1945 tidak ikut serta dalam menghadirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang menjebol Bank Indonesia dan melakukan perampokan BLBI. Bukan pula Pasal 33 yang membuat perekonomian diampu dan di bawah kuratil negara tetangga (L/C Indonesia dijamin Singapore). Bukan Pasal 33 yang menghadirkan kesenjangan ekonomi (yang kemudian membentuk kesenjangan sosial yang tajam dan mendorong disintegrasi sosial ataupun nasional), meminggirkan rakyat dan ekonominya. Bukan pula Pasal 33 yang membuat distribusi pendapatan Indonesia timpang dan membiarkan terjadinya *trickle-up mechanism* yang eksploitatif terhadap rakyat, yang menumbuhkan pelumpuhan (*disempowerment*) dan pemiskinan rakyat (*impoverishment*). Lalu, mengapa kita memaki-maki Pasal 33 UUD 1945 dan justru mengagung-agungkan globalisasi. globalisasi dan pasar-bebas yang penuh jebakan bagi kita, dan mengatakan bahwa perintah dari Pasal 33 UUD 1945, masih sangat umum dan abstrak. Pasal 33 tidak menghambat, apalagi melarang kita maju

²⁴ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, (Yogyakarta: Erlangga, 2002). hlm. 77.

dan mengambil peran global dalam membentuk tata nan baru ekonomi mondial. 5 butir Ayat Pasal 33 UUD 1945 merupakan filosofis dari cita-cita suatu bangsa, bangsa yang besar, yakni bangsa indonesia guna mencapai suatu tatanan perekonomian nasional, dan keejateraan sosial.²⁵

d. Konteks Masa Depan

Kita semua telah mengetahui perjuangan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, bung karno perna menyatakan bahwa pasal 33 UUD 1945, merupakan masa depan perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta suatu keutuhan ketahanan nasionalisme negara republik indonesi. Seringkali di berbagai kesempatan dan pada berbagai tulisan, Bung Hatta menegaskan tentang perbedaan antara “*kedaulatan rakyat Indonesia*” dengan kedaulatan rakyat di Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi (*Volkssouvereiniteit* atau *people's sovereignty*) berbeda antara paham Indonesia dan paham Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi tidaklah sama mengenai apa yang berlaku di Barat dan yang berlaku di Indonesia.²⁶

Demokrasi di Barat bertumpu pada paham liberalisme dan individualisme. Di pihak lain, demokrasi di Indonesia yang juga bertumpu “*rasa bersama*” lebih spesifik lagi, berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*brotherhood*). Kebersamaan dan asas kekeluargaan yang sesuai dengan budaya Indonesia ini juga dikenal di Barat dengan istilah *mutualism and brotherhood*, yang kiranya di dalam lingkungan masyarakat beragama Islam dikenal sebagai ke-*jemaah*-an dan ke-*ukhuwah*-an, Demokrasi Barat yang juga bertumpu pada kedaulatan rakyat itu disebut sebagai demokrasi liberal yang menjunjung tinggi nilai-nilai individualisme. Kepentingan individu atau orang per orang lebih diutamakan dalam demokrasi Barat. Sebaliknya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasioanal*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad (bandung: t.t.). hlm. 33.

dalam demokrasi Indonesia, yang dipentingkan adalah kebersamaan dan kepentingan bersama, artinya mengutamakan kepentingan kolektif. Demokrasi Indonesia atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan ini di dalam kehidupan keekonomian ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang di cita-citakan sebagai rell guna mengarahkan suatu kehidupan, berbangsa dan ber negara yang bermuara pada masa depan yang cerah, yakni tercerminkan dalam suatu kebiasaan masyarakat yang hidup dan saling menghidupi secara seksama oleh bingkai kekeluargaan, negara yang melindungi, mengayomi, dan menghidupi rakyatnya dengan melihat keseluruhan hak nya.²⁷

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mendalam.dimana the fonding father kita menggaganya menggunakan kaca mata sejarah, dan orientasi. Namun, hal itu terlihat dari kesadaran mereka akan suatu realitas bahwa setelah paham ekonomi komunis yang berlaku di Uni Soviet dan di Eropa Timur runtuh dan kemudian saat ini kita menyaksikan bahwa paham kapitalisme Barat dengan pasar-bebasnya mulai guncang dan mulai diragukan oleh rakyat Amerika Serikat dan Eropa, maka oleh kelompok ekonomi yang menyebut dirinya berpaham ekonomi konstitusi, maka Pasal 33 UUD 1945 mulai di gagas, dibangkitkan kembali untuk menjadi harapan dan andalan. Perlu di ketahui bahwa paham ekonomi, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang di gagas sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah “*jalan tengah*” melainkan adalah “*jalan akan datang*”. Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai “*jalan lurus*” yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah dalam konsepsi ekonomi Bung Hatta, pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “*daulat-rakyat*” bukan “*daulat-pasar*”.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁸ *Ibid.*

Untuk Indonesia yang mewarisi berbagai ketimpangan-ketimpangan struktural, baik dari segi hukum, sosial dan politik, tak terkecuali dari segi ekonomi, maka Pembangunan Nasional haruslah dilakukan melalui suatu perencanaan nasional. Masa depan Indonesia harus didisain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tandas digariskan, sesuai dengan pesan konstitusi. Perencanaan pembangunan nasional adalah pilihan imperatif, perekonomian harus disusun, sekali lagi tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas. Pasar tidak akan mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Bahwa perekonomian harus “*disusun*” tidak boleh dibiarkan “*tersusun*” sendiri melalui mekanisme pasar-bebas *a la competitive economics*, maka makin jelas dari Sabda Rasul SAW (HR Abu Dawud) agar “*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput*” Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat. Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 adalah sangat Islami sangat sesuaidengan kondisi masa depan ke-indonesia-an, yang notabenenya beragama islam. karena karena Pasal tersebut mengutamakan ‘*usaha bersama*’ atau usaha “*ber-jemaah*” yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai “*mutualism*” melalui perserikatan itu yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan, Demikian pula arti dari asas kekeluargaan yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai “*brotherhood*” yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai ‘*ukhuwah*’ baik *diniyah*, “*wathoniyah*” maupun “*bashariyah*”.²⁹

Oleh karenanya suda sepatut nya kita mengilhami roh dari Pasal 33UUD 1945, mengapresiasi dalam setiap pemikiran dan tindakan kita, indonesia kini suada mengara pada suatau era hegomoni baru, era kapitalisme, neoliberalisme adalah suatu erab dimana pandangan dunia yang tertuju pada penguasaan semata, menuhankan meteri, dan menghalalkan segala cara

²⁹ Sri Edi Swarsono, *Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 27 Desember 2007. hlm. 17.

demokrasi, kepuasan dan kekuasaan, kita tidak lagi di jajah dengan kekerasan, namun penjajahan tersebut kini berganti rupa dengan kedok ideologi. Kita di jajah melalui pemikiran yang menghegemoni seluruh struktur pemikiran kita, tanpa kita sadari kita telah membunuh di atas tanah kita sendiri, kini kita telah jauh dari asas kekeluargaan, kita hidup dengan suatu pertarungan yang tidak sehat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kita telah menyalahi konsep perekonomian dan kesejahteraan sosial, di era kontemporer, Indonesia kini berhadapan dengan beragam ideologi baru yang semakin menjauhkan kita dari nilai-nilai Pancasila. Globalisasi, modernisme, dan posmodernisme. Pada hakikatnya dalam Bab XIV UUD 1945 Pasal 33, yang berjudul “Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial” ini terbilang merupakan antitesa dari setiap perubahan dan ketimpangan zaman ke depan.³⁰

3. Kontekstualisasi Dan Implementasi Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945.

³⁰ Ibid.

*Peta penguasaan kapital asing terhadap sumber daya migas Indonesia.
(Foto: pungpungs.wordpress.com)³¹*

Dalam pidato 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila, Bung Karno kuat-kuat berpesan, “kita hendak mendirikan suatu negara *semua buat semua*. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi *semua buat semua*.” Itulah cita-cita politik pendirian negara Indonesia. Begitu Indonesia merdeka, cita-cita politik itu menjadi jiwa konstitusi “UUD 1945”, yang menegaskan pengakuan terhadap prinsip keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, cita-cita politik pendirian negara Indonesia itu dikhianati oleh penyelenggara negara, yakni sejak rezim orde baru hingga sekarang ini. Di era orde baru, kemakmuran hanya dinikmati oleh kapital asing dan segelintir elit di dalam negeri, yakni Soeharto dan kroninya.³²

Sekarang, setelah 14 tahun reformasi bergulir, keadaannya tidak banyak berubah. Kemakmuran tetap hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tahun 2012 lalu, majalah Forbes melangsir kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan 40 orang terkaya itu mencapai Rp 800 triliun atau separuh dari APBN kita. Menurut hitungan Perkumpulan Prakarsa, kekayaan 40 orang itu setara dengan kekayaan 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin. Sementara kekayaan 43 ribu orang terkaya di Indonesia setara akumulasi kepemilikan 60% penduduk atau 140 juta orang. Anggota DPR *Budiman Sudjatmiko*, yang mengutip data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengungkapkan bahwa Konsentrasi kepemilikan aset juga

³¹ <http://renytriutami.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber-hukum.html>

³² Sjaaffroedin Bahar et.al. (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usah-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) dan Panitia Persiapan (PPKI) Tanggal 29 Mei 1945-19 Agustus*, sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1992. hlm. 203.

meningkat: 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air. Artinya, aset nasional bangsa ini hanya dikangangi oleh 440 ribu orang.³³

Kenyataan itu diperkuat oleh fakta indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia yang terus meningkat: dari 0,50 (1983) menjadi 0,72 (2003). Ketimpangan kepemilikan aset itu kemudian berimbas pula pada ketimpangan pendapatan. Gini Rasio, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan, juga meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir: dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2011). Akan tetapi, penguasa utama ekonomi Indonesia adalah kapital asing. Merekalah yang sekarang ini menggenggam hampir seluruh sumber daya alam dan sektor-sektor produksi strategis. Akibatnya, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat, yakni 6,5%, tetapi sebagian besar mengalir keluar. Dominasi modal asing ini sangat besar. Sebagai contoh, sekalipun kita punya kekayaan gas, tetapi hasil produksinya hanya dikontrol 6 perusahaan asing. Akibatnya, gas tersebut tidak digunakan untuk melayani kebutuhan dalam negeri, seperti menopang industri pupuk, listrik (PLN), dan lain-lain, melainkan diekspor keluar untuk menghasilkan profit bagi korporasi asing. Saking berkuasanya, kapital asing bisa membeli hukum Indonesia untuk melegalkan praktek eksploitasinya. Ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM), Revrison Baswir, menyebut praktek ini sebagai bentuk “legalisasi kolonialisme”. Lebih jauh lagi, kekuatan kapital asing ini, melalui IMF, Bank Dunia, dan WTO, bisa menentukan kebijakan ekonomi-politik Indonesia. Negara Indonesia sekarang bukan lagi “negara buat semua”. Negara Indonesia saat ini, berikut aparatus ideologis dan represifnya, dikendalikan oleh segelintir orang, yakni pemilik modal. Mereka dengan gampang menggunakan hukum

³³ *Ibid.*

untuk menjerat rakyat. Namun, ketika giliran mereka yang melanggar hukum, tak ada yang bisa menjeratnya.³⁴

a. Inkonstitusional Penerapan Pasal 33 UUD 1945.

Bangunan peraturan perundang-undangan kita dibidang ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat juga berkontribusi besar terhadap kemunduran perekonomian tersebut. Sumber daya alam yang semestinya digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak saat ini banyak dikuasai oleh swasta. Akibatnya kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh kaum pemodal dan orang-orang kaya. Pernyataan Permasalahan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. telah mengalami degradasi makna. Pasal 33 ayat (2) berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat (3) berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Tindakan dan kebijakan pemerintah yang memprivatisasi perusahaan-perusahaan BUMN yang notabene ada untuk menjadi motor pergerakan ekonomi rakyat merupakan kebijakan yang inkonstitusional dan merupakan pelanggaran atas hak konstitusi warga negara yang dituju oleh ketentuan pasal 33 tersebut; karena apa yang diuraikan dalam materi muatan pasal 33 UUD 1945. mencirikan sosialisme ekonomi kerakyatan bukan ekonomi kapitalis. amun pada kenyataannya sangatlah bersebrangan dengan apa yang di harapkan, misalnya Utang negara begitu melonjak, aset pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia di kendalikan oleh 80 persen perusahaan asing Ketimpangan inilah hasil dari instrumen politik dan membenarkan adanya dominasi neo-imperialisme.³⁵

³⁴ Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan kesejahteraan social*, Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 6 Agustus 2008. hlm. 12.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

Budayawan Seno Gumira Adjidarma melihat budaya ketergantungan terhadap asing itu sudah dimulai sejak zaman raja Jawa. Mereka itu, sebetulnya, tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Dengan kata lain para raja atau priyayi memiliki mental bersenang-senang. Tidak mau menderita dan malas bekerja. Andalan mereka adalah ngutang kepada pihak asing. Imbalannya para raja itu akan memberikan sesuatu yang pihak asing itu inginkan. Mereka itu dinamakan Seno sebagai kaum borjuis Indonesia. Malangnya, kaum borjuis ini tidak seperti borjuis di Perancis yang hidup di atas modal yang menikmati kehidupan mewah berdasarkan hasil perdagangan (merkantilis). Arus globalisasi yang didukung kuat neo-kapitalisme dan neo-liberalisme, menyebabkan kita sebagai bangsa menjadi limbung dan nyaris tak lagi memiliki ideologi dan identitas kebangsaan. Kita hanya sekedar menjadi pasar dari produk multinational corporation. Di lain pihak telah pula menjadi bangsa yang ketagihan dan menderita ketergantungan utang. Martabat bangsa tak lagi menjadi kebanggaan. Bangsa ini semakin terjebak dalam kubangan sistem ekonomi neoliberal. Akibatnya hak-hak dasar warga negara telah dijadikan komoditas dagang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya yang menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dikuasai negara dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin tidak jelas hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.

Kekuatan asing imperialisme ini bertujuan untuk.³⁶

1. Memaksakan proses demokratisasi ideologi dan politik di berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia;
2. Memaksakan proses liberalisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia;
3. berusaha secara paksa untuk merebut pengaruh politik sehingga mampu mengendalikan proses politik di berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia;

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

4. berusaha secara paksa menguasai sumber-sumber ekonomi potensial di berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia; dan
5. berusaha untuk menciptakan tatanan dunia sebagai “one world with different cultures” dengan AS sebagai polisi dunia.

Selanjutnya, kekuatan asing ini dalam melaksanakan konsepsinya menggunakan strategi memaksakan perubahan perundang-undangan di negara sasaran, dan di Indonesia langkah ini dimulai dengan terbitnya berbagai perundang-undangan yang cenderung liberal. Jaringan subversi kekuatan asing yang bertindak sebagai agen pengendali adalah lembaga-lembaga internasional yang telah dikuasainya. Antara lain: PBB melalui UNDP (United Nations Development Program), Bank Dunia, IMF, Nathan Associates Inc, And Checehi and Company Consulting Inc and Partner termasuk REDE (semuanya berasal dari AS), ODA, EU-MEE, HDC, AUSAID, Delegation of the European Commission to Indonesia (semua berasal dari Eropa dan Australia) dan Conculative Group on Indonesia (CGI). Sedangkan yang bertindak sebagai agen utama prinsipil terdiri dari beberapa LSM asing yang berkolaborasi dengan beberapa LSM dalam negeri, yaitu: Partnership for Goverment Reform (PGR), USAID terdiri dari Ellips Project, NDI, Partnership for Econonic Group (PEG), JICA, Ford Foundation, IDEA Indonesia (jaringan NGO Jerman), dan Transparency International (TI) yang berpusat di Berlin (lihat Lembaga Kajian Krisis Nasional (LKKN).

Ada pun orang-orang asing yang menjadi operator pembuatan undang-undang yang “bergentayangan” di berbagai departemen, antara lain:³⁷

1. Departemen Keuangan: Arthur J. Mann dan Burden B. Stephen V. Marks (ahli perpajakan).
2. Bank Indonesia: Thomas A. Timberg penasehat bidang skala kecil dan Susan L Baker konsultan bidang Konstrukturisasi Perbankan.
3. Deperindag: Etephen L Magiera ahli Perdagangan Internasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi, internal carriers to trade and local discriminatory action.

³⁷ <http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/pengertian-ekonomi-dan-hukum>

4. Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Koperasi: Robert C Rice ahli small and medium enterprice.
5. Kementerian Koinfo: Harry F Darby ahli regulasi komunikasi.
6. Departemen Perhubungan: Richard Belenfeld dan Don Frizh konsultan PEG bidang pelayaran dan pelabuhan; dan
7. Departemen Hukum dan HAM: Paul H Brietzke legal advisor.

B. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Klasula “Dikuasai Oleh Negara” Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.

Untuk mengetahui Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Klasula “Dikuasai Oleh Negara” Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia. Maka penulis akan membaginya ke dalam dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor Hukum dan Penerapannya.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai, dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis. Untuk menmbahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan

Ishaq, dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :³⁸

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 55.

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.³⁹

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional, Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁰

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.⁴¹

b. Pengaruh Politik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum

Membicarakan korelasi antara hukum dan politik merupakan kajian yang menarik di kalangan ahli hukum dan politik. Kajian ini menarik karena dua topik ini memiliki ranah yang berbeda. Hukum merupakan ranah yang nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat pemaksaan. Hukum adalah wilayah “hitam putih” yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebaskan bahkan mendapat penghargaan (*rewards*). Sedangkan politik adalah ranah “*kepentingan*” sebagai corestone nya, “*politic is a goal attainment*” politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh. Pada masa orde baru (1966-1999) dipandang sebagai rezim yang menjalankan demokrasi Pancasila tetapi sesungguhnya itu hanya topeng untuk tidak melaksanakan demokrasi yang sebenarnya. Kehidupan politik yang senyatanya terjadi adalah politik yang non-demokratis yang ditunjukan dengan pengangkatan anggota legislatif oleh pemerintah tanpa melalui proses Pemilihan, kepanitiaan Pemilu dari pemerintah yang tidak “netral” cenderung mendukung partai yang berkuasa dan adanya lembaga recall terhadap anggota Dewan yang kritis terhadap pemerintah. Implikasinya dalam proses pembentukan hukum adalah lahirnya produk hukum yang konservatif dan ortodoks.

Uraian di atas memperlihatkan betapa politik sangat mempengaruhi proses pembentukan hukum. Hukum seolah-olah tidak memperlihatkan cirinya yang bersifat netral dan mencerminkan keinginan bersama orang yang diaturnya. Maka tepatlah tesis yang dilontarkan oleh para penganut aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*) bahwasanya hukum itu

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 60.

tidaklah “*netral*” atau “*bebas nilai*”. Sesungguhnya dibalik peraturan hukum yang tertera dalam bentuk Undang-undang itu mencerminkan kepentingan pihak tertentu dan biasanya kepentingan penguasa.

c. Faktor Degradasi kepemimpinan.

Pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri para nabi manusia pilihan Allah. Karena secara korelatif, ayat-ayat tertentu dalam al-quran menggambarkan para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang men sejahterakan umat lahir dan batin. Sebagaimana allah SWT berfirman:

”Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah” (Q.S. Al-anbiya’:73)

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Krisis kepemimpinan telah melanda Indonesia, hal ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Krisis ini bisa dibilang melanda semua orde sejarah perjalanan bangsa kita. Dimulai dari zaman orde lama dan orde baru, memang di kedua orde itu Indonesia memiliki sosok pemimpin yang hebat, Soeharto dengan kekuasaan orde barunya. Meskipun Soeharto pemimpin yang hebat tapi sama saja ia diturunkan oleh rakyat.⁴²

Sesuai gagasan kami hendaklah pemimpin ideal itu memiliki aspek-aspek dalam dirinya sebagai berikut:⁴³

⁴² Kamarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama(sebuah kajian hermeneutik)*, Paramadina, Jakrta, 1996. hlm. 67.

⁴³ <http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami>.

1. Kepemimpinan Demokratis, Tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat
2. Kepemimpinan Karismatis, Tipe kepemimpinan dimana pemimpin memiliki daya tarik yang amat kuat. Seolah-olah dalam diri pemimpin tersebut terdapat kekuatan yang luar biasa, sehingga dalam waktu singkat dapat menggerakkan banyak pengikut. Termasuk pemimpin semacam ini misalnya: Gandhi, J.F.Kennedy dan Khomeini. Kepemimpinan tipe ini adalah baik selama pemimpin berpegang teguh kepada moral yang tinggi dan hukum-hukum yang berlaku.
3. Komunikasi, Kemampuan komunikasi amat penting bagi seorang pemimpin. Sehingga pesan yang disampaikan bisa jelas. Kemampuan berkomunikasi yang jelas ini juga penting agar pemimpin bisa menyelaraskan semua anggota timnya menuju tujuan yang diinginkan.
4. Cepat menangani masalah, Ketika muncul masalah, segera seorang pemimpin mencari jalan pemecahannya. Agar masalah itu cepat tertangani dan mendapat solusinya. Sehingga masalah yang muncul tak sampai berlarut-larut.
5. Percaya diri, Seorang pemimpin yang baik itu punya rasa percaya diri yang baik. Di saat-saat genting sekalipun, seorang pemimpin bisa mengangkat moral timnya sehingga masalah yang muncul bisa diatasi dengan baik.
6. Memiliki sifat adil, Sifat adil di sini adalah adil dalam arti luas, artinya pemimpin haruslah mampu menjalankan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Pemimpin harus dapat menjaga kehormatan dirinya, pemimpin juga harus mengawasi segala kebijakan yang diambil oleh bawahannya. Pemimpin pun harus mengawasi berjalannya penegakkan hukum dan keadilan di negara yang dipimpinnya.

Negara ini sangat merindukan sosok pemimpin seperti, Muh. Hatta, Soekarno, Muh. Yamin, dan Soepomo, mereka adalah pemimpin dambaan yang mungkin dapat meluruskan kembali cita-cita bangsa. Demikian gagasan kami tentang pemimpin ideal untuk Indonesia. Berdasarkan apa yang telah kami utarakan tentang syarat-syarat pemimpin ideal, tidaklah bertentangan dengan golongan manapun ataupun dengan konstitusi negara kita. Maka sekiranya

gagasan kami ini dapat menjadi pertimbangan bagi kita untuk memilih pemimpin untuk Indonesia. Yang mampu memupuk memiliki segala aspek sebagaimana dengan kondisi geografis negara Indonesia yang multidimensional, dan multi kultural, agar negara ini dapat kembali pada rel yang sudah di cita-citakan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ketidak Mandiri dalam Ber-Ideologi.

1. Sistem Ekonomi Bebas (Liberal)

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi di atur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran), sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing, konsekuensinya adalah yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.

Ciri-cirinya:⁴⁴

- a. Harga barang di tentukan oleh pasar
- b. Timbulnya persaingan besar.
- c. Adanya pengakuan terhadap hak individu.
- d. Modal memegang peranan sangat penting.

Kaum kapitalis, dalam system demokrasi liberal adalah penguasa di balik panggung politik. Mereka adalah sponsor yang mendanai dan mengongkosi biaya politik para elite politik dan penguasa negeri. Mereka membangun relasi mutualisme dengan elite politik dan penguasa. Dengan begitu mereka bisa mengendalikan serta mengontrol jalannya system ekonomi politik negara yang dijalankan oleh elite politik atau pemimpin kita. Sehingga sistem ekonomi politik negara hanya akan melayani kepentingan kaum kapitalis tersebut. Hal itu terbukti, banyak UU

⁴⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1971. hlm. 85.

negara yang telah dibuat oleh pemerintah pasca reformasi hanya mendukung kepentingan kapitalis asing. Diantaranya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Semua Undang-Undang tersebut disusun hanya untuk melapangkan usaha dan bisnis kaum kapitalis yang beroperasi di nusantara. Maka tidak heran kalau sumber-sumber ekonomi nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak sudah dikuasai asing. Tambang minyak dan gas (migas), misalnya, 80 persennya dikelola dan dikuasai oleh korporasi asing. Pemerintah hanya menjadi penonton yang mengharap pajak dari proses pengerukan migas tersebut. Pemerintah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil dari usaha migas. Pihak korporasi asinglah yang meraup semua keuntungan bisnis migas tersebut.⁴⁵

Kebijakan nasionalisasi kekayaan tambang nampaknya tidak masuk akal dalam konteks demokrasi liberal saat ini. Sistem demokrasi liberal sesungguhnya hanya mengukuhkan posisi dan kekuasaan kaum kapitalis. Pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari system demokrasi liberal adalah komprador-komprador asing yang bekerja bukan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi liberal yang seiring dan sejalan dengan kapitalisme global tidak akan pernah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berani bersikap tegas terhadap kaum kapitalis. Pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari demokrasi liberal adalah pemimpin-pemimpin “*inlander*” yang rela dijajah negerinya asal kehidupan diri dan keluarganya tetap kaya

⁴⁵<http://renytriutami.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber-hukum-ekonomi.html>

serta lebih kaya raya. Maka dari itu, kita sangat sulit mengharap model demokrasi liberal yang kita jalankan sekarang akan membuka pintu kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa ini.

Peran Negara dalam Ekonomi dapat di lihat dalam Tabel berikut ini:⁴⁶

	Kapitalisme	
Ekonomi kerakyatan	Negara kesejahteraan	Ekonomi neoliberal
1. menyusun ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, mengembangkan koperasi (Pasal 33) ayat (1)	1. mengintervensi pasar untuk menciptakan kondisi kesempatan kerja penuh	1. mengatur dan menjaga mekanisme pasar, mencegah monopoli
2. menguasai cabang-cabang produksi milik negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak, mengembangkan BUMN.(Pasal 33) ayat (2)	2. Menyelenggarakan BUMN cabang-cabang produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta	2. Mengembangkan sektor swasta, dan melakukan privatisasi BUMN
3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33) ayat (3)	3. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan	3. Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif sebagai masuknya investasi asing
• Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat, memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi	4. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.	4. Melaksanakan kebijakan anggaran ketat, termasuk menghapuskan subsidi
• Menjaga stabilitas moneter.	5. Menjaga stabilitas moneter.	5. Menjaga stabilitas moneter.
• Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).	6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.	6. Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum.
• Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).	7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.	7. Tidak melihat hal tersebut

Sumber: Revrison Baswir, 2009

⁴⁶ Ibid.

Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut, tidak terlalu berlebihan bila disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu, sebagai saudara kandung neoliberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (keynesianisme), juga tidak dapat disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Keynesianisme memang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja penuh, namun demikian ia tetap dibangun berdasarkan prinsip persaingan bebas dan kepemilikan alat-alat produksi secara pribadi (selengkapnya lihat tabel). Perlu saya tambahkan, ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial. Sebagaimana dikemukakan Giersch (1961), ekonomi pasar sosial adalah salah satu varian awal dari neoliberalisme yang digagas oleh Alfred Muller-Armack.

2. *Sistem Kapitalisme Pendidikan*

a. Kapitalisme Pendidikan.

Secara etimologi kapitalisme berasal dari kata kapital. Kapital berasal dari bahasa Latin yaitu *capitalis* yang sebenarnya diambil dari kata *kaput* (bahasa Proto-Indo-Eropa) berarti “kepala”. Arti ini menjadi jelas jika kita gunakan dalam istilah “pendapatan per kapita” yang berarti pendapatan per kepala. Juga masih memiliki arti yang sama, ketika dipakai dalam kalimat *capital city* (kota utama). Kapitalisme pendidikan terjadi apabila prinsip kapitalisme digunakan di dalam sektor pendidikan, negara tidak membatasi kepemilikan perorangan di dalam sektor pendidikan, artinya satuan penyelenggara pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan (sektor swasta atau aktor non negara), dimana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Pengelola sektor pendidikan (pihak swasta) ini, mulai bersaing antara satu dengan

lainnya. Bagi pihak pengelola pendidikan yang memenangkan persaingan akan mendapatkan pengguna jasa pendidikan lebih banyak.⁴⁷

b. Peran Kapitalisme Pendidikan.

Kapitalisme pendidikan berarti arah pendidikan dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis tersebut, proses ini di buat secara mendalam sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik. Kita dihadapkan pada pilihan antara pendidikan kompetisi ekonomi yang mencari kemenangan diri dan pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian. Pilihan pertama akan menciptakan korban yakni mereka yang kalah berkompetisi, tetapi disisi lain cepat membuahkan keuntungan finansial bagi yang menang.⁴⁸

c. Dampak Kapitalisme Pendidikan.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kapitalisme pendidikan ini. Kebanyakan dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Menurut Mujiyanto (2010), ada beberapa dampak dari kapitalisme pendidikan yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang.
2. Masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial Indonesia juga akan tetap berada dalam kapitalisme global.
3. Dalam sistem kapitalis, negara hanya sebagai regulator/ fasilitator.
4. Pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah ke atas.
5. Praktik KKN semakin merajalela.

⁴⁷ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 13.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

6. Kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia

Tidak ada dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya sistem kapitalisme pendidikan ini. Semua dampak tersebut bermula karena adanya privatisasi yaitu penyerahan tanggungjawab pendidikan ke pihak swasta. Yang menyebabkan lembaga pendidikan dikelola oleh pihak swasta dan tentunya pemerintah sudah tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Disini peran pemerintah hanya sebagai regulator/ fasilitator dan kebijakan sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta. Dari fakto-faktor yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dampak akibat penerapan kapitalisme dalam sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan pemerataan pendidikan kurang merata, karena masih banyak warga yang belum bisa mengakses dan mendapatkan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan semakin mahalnya biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian kalangan masyarakat, oleh karenanya pengetahuan dan keverdasan masyarakat semakin terkebelakang, merosot, dan tertinggal. Terutama pada daerah-daerah yang tidak mendapat perhatian oleh pemerintah pusat. Wawasan dan kesadaran masyarakat akan hukum pun tentunya semakin konservatif primordial, oleh karenanya akan berdampak pada pembodohan oleh pihak manapun yang mempunyai kepentingan, terutama pihak asing.⁵⁰

b. Faktor Besarnya Intervensi Asing.

Indonesia terjajah bangsa asing, disadari atau tidak, kita telah menjadi bangsa yang miskin akibat penjajahan model baru ini. Negeri tercinta ini memang sudah merdeka dari penjajahan fisik yang dilakukan oleh negara-negara kolonialis. Namun penjajahan non-fisik (yakni penjajahan pemikiran/ideologi, politik, ekonomi, sistem sosial dan budaya) yang berakar pada Kapitalisme global sering tidak disadari sebagai bentuk penjajahan. Padahal penjajahan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

non-fisik dalam wujud dominasi Kapitalisme global ini jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Lihat saja, di bidang ekonomi, beban utang Indonesia lebih dari Rp 1.400 triliun. Bahkan para pejabat Indonesia terus menyerahkan leher Indonesia dijerat utang luar negeri. Di bidang hukum, yang berlaku di Indonesia 80% masih hukum Belanda. Secara politik, Indonesia juga tidak luput dari cengkeraman hegemoni global negara-negara adidaya. Indonesia saat ini tunduk pada negara Barat (AS dan sekutunya) dalam apa yang mereka sebut perang global melawan terorisme. Bukan hanya itu, atas nama HAM, Demokrasi, dan Pluralisme, negara penjajah juga terus melakukan intervensi yang mendorong disintegrasi. Buahnya yang nyata adalah lepasnya Timor Timur. Bukan tidak mungkin, Papua, juga Aceh dan Maluku bakal menyusul. Tanda-tanda ke arah sana sangat nyata. Semua ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak mandiri dan belum bebas dari campur tangan asing. Secara jujur harus kita akui, Kapitalisme global saat ini yang merupakan salah satu ideologi transnasional bukan hanya merupakan ancaman, namun benar-benar telah merusak dan mengobok-obok Indonesia.⁵¹

Lebih ironis lagi, kondisi semacam ini diperparah oleh adanya krisis moral tindakan para elit yang memanipulasi kekuasaan atas nama rakyat. Lihat saja, ketika para pencuri ayam, dan para penjahat kelas teri tewas di tangan massa, para koruptor kelas kakap, konglomerat pengemplang uang Negara atau kas daerah, dan provokator pengadu domba rakyat dibiarkan hidup tenang menikmati hasil kejahatan mereka. Kriminalitas rakyat kecil pun kemudian digunakan untuk menutupi ilegalisme penguasa Ketika rakyat menjerit menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat baik di eksekutif maupun di legislative justru sibuk "*adu jotos*", "*adu syahwat*" dan "*pamer libido kekuasaan*" sesama mereka. Ketika orang

⁵¹ Wahyudi Kumorotomo dengan judul "Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi", (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1995), hlm. 19.

kebanyakan negeri ini sedang prihatin mempertanyakan masa depan anak-anak mereka, para politikus sibuk berebut lahan basah dan menjajaki kemungkinan aliansi atau membentuk koalisi untuk menyiapkan masa depan kemenangan diri dan partai masing-masing. Walhasil banyaknya persoalan-persoalan besar dalam ekonomi dan dominasi asing di banyak bidang atau sektor yang vital telah menjerumuskan negara kita dalam jurang kehancuran. Bahkan membikin negara kita menjadi negara yang terkorup di Asia.⁵²

⁵² *Ibid.*, hlm. 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka dapt ditarik beberapa kesimpulan, sebagai barikut:

1. Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara” Menurut Pasal 33 UUD Neegara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia adalah. pada faktanya Implementasi klausual “*dikuasai oleh Negara*” dalam pasal 33 UUD 1945, suadah melenceng dari nilai-nilai unversal Negara Republik Indonesiase, bagaimana dapat terlihat dari Pengaturan atas perekonomian oleh pemerintahan dari Orde ke Orde, yang sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian pancasila. Dengan motode penafsiran hukum dapat dilihat bahwa Menurut sejarahnya, pembangunan ekonomi Indonesia itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan orang seorang. Inkonstitusionalisasi penerapan pasal 33 UUD 1945. telah dimulai dan mencapai puncaknya pada akhir rejim orde baru dan masa reformasi hingga rejim sekarang ini, Inkonstitusionalisasi itu dilakukan dalam bentuk memprivatisasi Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sejatinya menjadi alat bagi negara untuk memajukan kesejahteraan dan tingkat penghidupan rakyat banyak. Privatisasi dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat, sebagai akibat dari kekeliruan implementasi, dan penyimpanan Pancasila serta makan klausula “*dikuasai oleh Negara*” daalam pasal 33 UUD 1945.

2. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara”

Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia antara lain: faktor internal yang mencakup, (1) Penerapan Hukum yang tidak efektif, (2) Pengaruh Politik dalam pembentukan dan Penegakan Hukum, (3) Degradasi kepemimpinan, serta faktor Eksternal yang mencakup, (1) Sistem Ekonomi Bebas (Liberal), (2) Sistem Kapitalisme Pendidikan, (3) Pengaruh Utang Luar Negeri, (4) Besarnya Intervensi Asing.

B. Saran.

1. Semoga metode hermeneutika hukum lebih banyak digunakan lagi dalam upaya menemukan hukum, menerapkan hukum, menciptakan hukum, dan dalam pembentukan hukumnya. Sebab salah satu kelebihan dari hermeneutika hukum ialah terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam, dan holistik dalam bingkai satu kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Dalam hal ini peristiwa hukum maupun peraturan undang-undang tidak semata-mata dilihat/ditafsirkan dari aspek legalitas formal berdasarkan bunyi teks-nya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa/sengketa itu muncul, apa akar masalahnya, adanya intervensi politik yang membidani dikeluarkannya putusan itu, serta sudahkah dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan (aspek sosio-politik-kulturalnya) dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publisings, 2010.

E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010

E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah metode filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

FAISAL BASRI, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga: Jakarta, 2002.

Inyik Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008.

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, *Teori Penemu Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII pers, Yogyakarta, 2005.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1971.

Kamarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama (sebuah kajian hermeneutik)*, Paramadina, Jakarta, 1996.

Ahmad Sukardja. *PIAGAM MADIYANAH Dan UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

B. Arief Sidharta. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2008

Yasraf Amir Piliang, *Simiotika dan Hipersemiotika*, MATAHARI, Bandung, 2012

Yudi Latif, *Negara Paripurna Historis, Rasional, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gremedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Yustika, Ahmad Erani. *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*.
Jakarta: PT.Grasindo, 2002.

Sumber lain

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2249663-hermeneutika>

<http://pitikkedu.blogspot.com/2012/12/pengertian-ekonomi-dan-hukum-ekonomi.html>

<http://newcyber18.blogspot.com/2012/05/pengertian-hukum.html>

<http://renytriutami.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber- hukum.html>

<http://renytriutami.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber-hukum.html>